



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 mengacu pada Visi RPJMD Kepulauan Riau 2025-2029 yaitu **"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"**. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan kepariwisataan yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan kepariwisataan hingga saat ini. Rencana Strategis Dinas Pariwisata disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata di Kepulauan Riau, serta partisipasi seluruh pejabat Dinas Pariwisata.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan dasar dan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pariwisata; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pariwisata; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Kinerja. Rencana Strategis ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas

Pariwisata serta para pemangku kepentingan pariwisata dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pariwisata secara sinergis dan berkesinambungan.

Akhirnya, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan Pariwisata.

Tanjungpinang, 25 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau



HASAN S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771110 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	20
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia	20
2.1.2.2. Sumber Daya Aset Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	41
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah	41
2.1.6. Kerjasama Daerah	41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	41
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif	55
2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	59
2.2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	59
2.2.4.2. Telaahan KLHS	67
2.3. Penentuan Isu-isu Strategis	68
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	70
3.1. Tujuan dan Sasaran	70
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan	78
4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah	111
4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	114
4.4. Indikator Kinerja Kunci	115
BAB V PENUTUP	117

LAMPIRAN

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
Tabel 2.2 : Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.3 : Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselonering.....	22
Tabel 2.4 : Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.5 : Kebutuhan Penambahan Pegawai pada Dinas Pariwisata	23
Tabel 2.6 : Rekap Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025	23
Tabel 2.7 : Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata 2021-2026	31
Tabel 2.8 : Target dan Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau (orang) Tahun 2021-2024	33
Tabel 2.9 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	39
Tabel 2.10 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	40
Tabel 2.11 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54

Tabel 2.12 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata	56
Tabel 2.13 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif	58
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	71
Tabel 3.2 : Penahapan Renstra Perangkat Daerah	73
Tabel 3.3 : Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	75
Tabel 4.1 : Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	83
Tabel 4.2 : Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.....	97
Tabel 4.3 : Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	111
Tabel 4.4 : Indikator Kinerja Utama	115
Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang jelas, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara terus menerus.

Langkah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya adalah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan tetap memperhatikan segala aspek pembangunan kepariwisataan yaitu tetap terjaga dan terpeliharanya kepribadian bangsa serta pelestarian lingkungan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Riau bertumpu pada keunikan dan kekhasan serta kearifan lokal yang menempatkan keanekaragaman sebagai suatu yang prinsip dan hakiki, dimana pengembangan kepariwisataan didukung oleh kekayaan alam serta keanekaragaman budaya yang dimiliki. Sangat disadari selain dampak positif yang diperoleh dari upaya pengembangan sektor pariwisata, tidak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti terjadinya degradasi nilai-nilai sosial budaya dan moral, degradasi kualitas lingkungan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, di samping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam periode 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana strategis merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan. Maka melaksanakan rencana strategis pariwisata ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan sektor kepariwisataan daerah. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 diupayakan tersusun secara sistematis dan terukur yang menuangkan kebijakan, program dan kegiatan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJPN, RPJMN, RPJPD, RTRW, KLHS RPJMD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra OPD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kepulauan Riau pada tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga terkait serta Renstra Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kepulauan Riau setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 - 10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 - 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
 - 27) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 885);
 - 28) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

- 29) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Teridentifikasinya program, kegiatan dan indikasi sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2025-2029;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan;
4. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Organisasi Perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Pada bab ini juga akan memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga; telaahan dokumen RTRW dan KLHS Provinsi Kepulauan Riau, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator dan targetnya. Selain itu pada bab ini juga akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menggambarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif. Pada bab ini juga akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

Bab ini meliputi penjelasan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta memuat harapan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55).

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

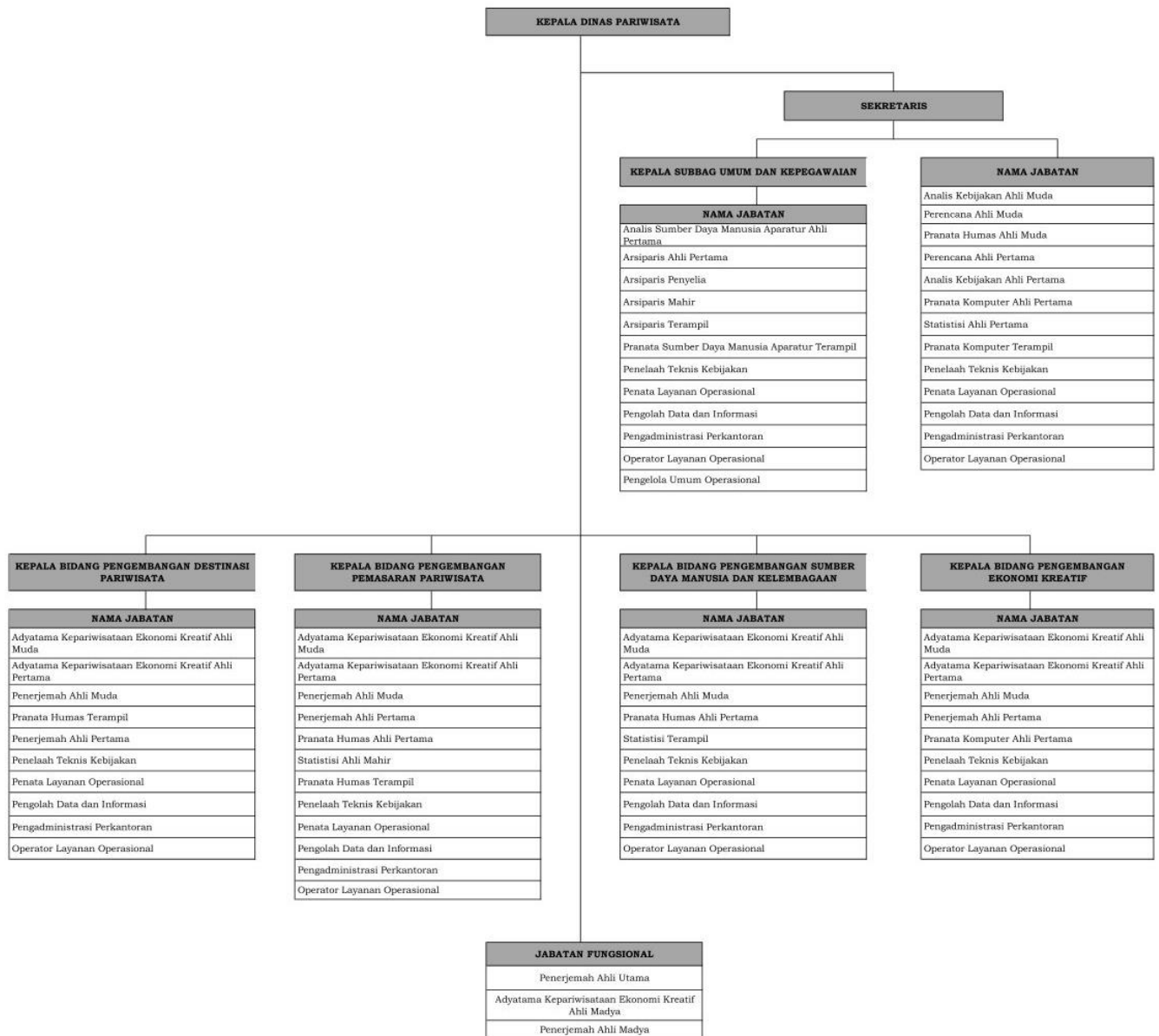
Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana digambarkan dalam bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Bagan 1. Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan

evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pariwisata mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Industri Pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Objek

- dan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Industri Pariwisata;
- b. pelaksanaan penetapan, perancangan, perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi, kawasan strategis provinsi, destinasi pariwisata provinsi;
 - c. pelaksanaan pengadaan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ sarana prasarana kawasan strategis dan destinasi pariwisata provinsi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata provinsi;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dan destinasi pariwisata provinsi;
 - f. penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
 - g. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota;
 - h. pengelolaan investasi pariwisata;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
 - j. pelaksanaan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
 - k. pelaksanaan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Promosi Pariwisata, Strategi dan Komunikasi Pariwisata, Kerjasama Pariwisata.

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Promosi Pariwisata, Strategi dan Komunikasi Pariwisata, dan Kerjasama Pariwisata;

- b. pelaksanaan promosi pariwisata dalam negeri dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dalam negeri dan luar negeri;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. pelaksanaan penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya dalam dan luar negeri;
- f. penyiapan data dan penyebaran informasi pariwisata;
- g. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam negeri, kemitraan pariwisata luar negeri;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pelatihan kepariwisataan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber

- daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif di bidang pengembangan standar kompetensi Ekonomi Kreatif, pelatihan Ekonomi Kreatif dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;
 - g. pelaksanaan dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - i. pelaksanaan koordinasi kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat daerah, regional, bilateral dan internasional;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - k. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam kemitraan pariwisata; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Ekonomi Keatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan

Regulasi, Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sarana Prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi, Kerjasama dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan kepada pemangku kepentingan dalam riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pendataan dan pemberian dukungan kepada pemangku terkait pengembangan sarana prasarana Ekonomi Kreatif dan Regulasi;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan sarana prasarana ekonomi kreatif dan regulasi;
- f. pelaksanaan kerjasama dan promosi kepada pemangku kepentingan terkait pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan perluasan pasar produk kreatif baik ekspor maupun pasar domestik;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum gambaran kondisi dari sumber daya di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Saat ini kondisi Kepegawaian di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari Pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, 19 (sembilan belas) fungsional, 1 (satu) Kasubbag dan 16 (enam belas) pelaksana, serta 25 (dua puluh lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 5 (lima) orang staf Tenaga Harian Lepas.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan Juni 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Strata 2 (S2)	6	6	12 orang
2.	Strata 1 (S1)	19	16	35 orang
3.	Ahli Madya (D3)	1	3	4 orang
4.	SLTA dan Sederajat	10	5	15 orang
5.	SLTP	-	-	0 orang
6.	SD	1	-	1 orang
Jumlah		37	30	67 Orang

Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan didominasi oleh Strata 1, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai bulan Juni 2025 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Pangkat/ Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1 orang
2.	Pembina TK. I (IV/B)	2	2	4 orang
3.	Pembina (IV/A)	3	4	7 orang
4.	Penata TK. I (III/D)	7	2	9 orang
5.	Penata (III/C)	1	4	5 orang
6.	Penata Muda TK. I (III/B)	4	6	10 orang
7.	Penata Muda (III/A)	1	2	3 orang
8.	Pengatur TK. I (II/D)	1	1	2 orang
9.	Pengatur (II/C)	0	1	1 orang
10.	Pengatur Muda (II/B)	0	0	0 orang
11.	PPPK Golongan IX	7	4	11 orang
12.	PPPK Golongan V	9	4	13 orang
13.	PPPK Golongan I	1	0	1 orang
Jumlah		37	30	67 Orang

Selain itu masih terdapat 5 (lima) orang pegawai Tenaga Harian Lepas yang saat ini masih mengikuti seleksi PPPK tahap II. Sedangkan keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan eselonering (jabatan struktural) hingga bulan Juni 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselonering

No.	Tingkat Eselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Eselon II	1	-	1 orang
2.	Pejabat Eselon III	3	2	5 orang
3.	Pejabat Eselon IV	-	1	1 orang
4.	Fungsional	10	9	19 orang
5.	Pelaksana PNS	6	10	16 orang
6.	Pelaksana PPPK	17	8	25 orang
6.	Staf THL	3	2	5 orang
Jumlah		40	32	72 Orang

Sementara keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan klasifikasi jenis kelamin pada Juni 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	40 orang
2.	Perempuan	32 orang
Jumlah		72 orang

Berdasarkan sumber daya pegawai yang ada, apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal jumlah pegawai berdasarkan struktur perangkat daerah Dinas Pariwisata, maka Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sedikitnya masih memerlukan 15 (lima belas) orang jumlah pegawai dengan perincian 3 (tiga) orang

staf yang akan dibagi pada masing-masing bidang. Rincinan kebutuhan penambahan pegawai dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5. Kebutuhan Penambahan Pegawai pada Dinas Pariwisata

No	Kebutuhan Pegawai	Jumlah
1.	Staf PNS	15 orang
Jumlah		15 Orang

2.1.2.2. Sumber Daya Aset Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dari sisi Bidang Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari asset sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan Juni 2025 berjumlah total 566 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Rekap Aset Dinas Pariwisata Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	M2	1	1	-	-
2	Mobil Dinas	Unit	5	2	1	2
3	Sepeda Motor	Unit	3	3	-	-
4	Mesin Ketik Listrik Portable	Unit	3	3	-	-
5	Lemari Besi/Metal	Unit	15	15	-	-
6	Lemari Kayu	Unit	27	27	-	-
7	Rak Besi	Unit	45	45	-	-
8	Rak Kayu	Unit	3	3	-	-
9	Filing Cabinet Besi	Unit	6	6	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
10	Filing Cabinet Kayu	Unit	1	1	-	-
11	Brangkas	Unit	1	-	-	1
12	Lemari Display	Unit	1	1	-	-
13	Lemari Kaca	Unit	40	40	-	-
14	Locker Katun	Unit	1	1	-	-
15	Alat Penghancur Kertas	Unit	5	5	-	-
16	Mesin Absensi	Unit	2	2	-	-
17	Alat Pemotong Kertas	Unit	6	2	-	4
18	Display	Unit	2	2	-	-
19	Papan Nama Instansi	Unit	3	-	-	3
20	Brand Kas	Unit	3	3	-	-
21	Meja Kerja Kayu	Unit	14	10	-	4
22	Kursi Besi/Metal	Unit	2	2	-	-
23	Meja Rapat	Unit	9	9	-	-
24	Meja Resepsionis	Unit	2	1	-	1
25	Kursi Rapat	Unit	2	2	-	-
26	Kursi Tamu	Unit	2	2	-	-
27	Partisi Kaca	Set	1	1	-	-
28	Partisi HPL	Set	1	1	-	-
29	Sofa	Unit	8	8	-	-
30	Filling Besi/Metal	Unit	2	-	-	2
31	Mesin Potong Rumput	Unit	1	-	-	1
32	Lemari Es	Unit	1	1	-	-
33	AC Unit	Unit	3	3	-	-
34	Rak Piring Alumunium	Unit	2	2	-	-
35	Televisi	Unit	19	19	-	-
36	Loudspeaker	Unit	1	1	-	-
37	Microphone	Set	1	1	-	-
38	Unit Power Supply	Unit	2	-	-	2
39	Camera Video	Unit	7	-	3	4
40	Dispenser	Unit	1	1	-	-
41	Gordyin/Kray	Set	1	1	-	-
42	Figura	Unit	20	20	-	-
43	Handtruck Trolly Plastics	Unit	1	1	-	-
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	1	-	-
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3	3	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
46	Meja Tamu Ruangan Biasa	Unit	2	2	-	-
47	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	Unit	1	1	-	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	2	-	-
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3	3	-	-
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	20	20	-	-
51	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	2	-	-
52	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	6	6	-	-
53	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	7	-	-	7
54	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Set	3	3	-	-
55	Sound Card STEINBERG - UR 824	Unit	1	1	-	-
56	Monitor Speaker	Unit	1	1	-	-
57	Power Mixer	Unit	1	1	-	-
58	Kabel Microphone	Set	1	1	-	-
59	Keyboard Midi	Unit	1	1	-	-
60	Camera + Attachment	Unit	2	-	-	2
61	Proyektor + Attachment	Unit	3	3	-	-
62	Printer	Unit	6	6	-	-
63	Kamera Udara (Drone)	Unit	1	1	-	-
64	Handy Talky	Unit	22	12	-	10
65	Facsimile	Unit	2	-	-	2
66	Video Conferencing Sytem	Set	1	1	-	-
67	Personal Komputer	Unit	9	9	-	-
68	Jaringan Website	Set	1	-	-	1
69	PC. Unit	Unit	44	14	-	30
70	Lap Top	Unit	42	20	-	22
71	Note Book	Unit	3	2	-	1
72	Printer	Unit	48	15	5	28
73	Scanner	Unit	2	2	-	-
74	Server	Unit	2	-	-	2

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
75	Closed Circuit Television (CCTV)	Set	1	-	-	1
76	Air Conditioning (AC)	Unit	15	15	-	-
77	Rambu Jalan	Set	1	1	-	-
78	Peralatan Olah raga air	Set	2	2	-	-
79	Rumah Genset Gedung LAM	Unit	1	1	-	-
80	Pos Jaga, Ruang CCTV dan Toilet Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	-
81	Penataan Pelabuhan Penyengat	Paket	1	1	-	-
82	Counter Pusat Informasi (TIC)	Paket	1	-	-	1
83	Rehap Bangunan Air Panas Kab. Karimun	Paket	2	2	-	
84	Rehab Replika Istana Damnah Kab. Lingga	Paket	1	1	-	
85	Landscaping Kota Rebah Tanjungpinang	Paket	1	1	-	
86	Taman Istana Engku Bilik (Penyengat)	Paket	1	1	-	
87	Renovasi Bukit Kursi Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	
88	Renovasi Barak Pengungsi Pulau Galang	Paket	1	1	-	
89	Renovasi Rumah Penjara Lingga	Paket	1	1	-	
90	Renovasi Bangunan Pulau Penyengat (Engku Bilik)	Paket	1	1	-	
91	Manara Pandang + Pos Peristirahatan	Set	1		-	1
92	Bangunan Obyek Wisata Air Terjun Anambas	Paket	1	1	-	-
93	Manara Pandang + Pos Peristirahatan	Unit	1	1	-	-
94	Gazebo (Bintan)	Unit	3	3	-	-
95	Batu Sikat Lantai Pelabuhan Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
96	Rehap Monumen Tugu Khatulistiwa Lingga	Paket	1	1	-	-
97	Jalan Lingkar Pulau Penyengat	Paket	2	2	-	-
98	Rehap Dermaga Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	-
99	Rehap Dermaga Pulau Abang	Paket	1	1	-	-
100	Sumur Bor + Menara Air + Instalasi Gedung LAM Dompok	Paket	1	1	-	-
101	Dock Start Elang Laut Belakang Padang	Unit	1	1	-	-
102	Film Bergerak & Rekaman (Film Raja Ali Haji)	Unit	1	1	-	-
TOTAL			566	425	9	132

Pada periode rencana strategis 2025-2029 direncanakan Dinas Pariwisata akan mengadakan penambahan aset untuk menunjang operasional Dinas Pariwisata. Di antaranya adalah melengkapi sarana prasarana kantor, seperti pengadaan mobil, sepeda motor, meubelair, pengadaan laptop/ personal komputer, printer, AC, scanner, drone dan kamera.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan kepariwisataan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, *cottage* dan lain-lain yang banyak tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampilkan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah, di samping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha

lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan/kuliner dan lain-lain.

Mempedomani Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2021-2026, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau melalui upaya:

- a. Pembangunan Bidang Destinasi Pariwisata yang meliputi; perwilayahan destinasi pariwisata, pembangunan kawasan strategis pariwisata, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat pariwisata, dan investasi pariwisata.
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata yang meliputi; pengembangan pasar pariwisata, pengembangan citra pariwisata, dan kemitraan pemasaran pariwisata, dan pengembangan promosi pariwisata.
- c. Pembangunan Industri pariwisata dengan arah kebijakan antara lain; peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata, pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas, penguatan struktur usaha pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, dan pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- d. Pembangunan SDM dan kelembagaan kepariwisataan yang meliputi; wisatawan, pekerja, pengusaha, pakar, dan masyarakat sekitar kawasan wisata.
- e. Pembangunan Ekonomi Kreatif yang meliputi; optimalisasi kemitraan usaha ekonomi kreatif antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

ekonomi kreatif, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing produk ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha ekonomi kreatif, penguatan struktur industri ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing industri ekonomi kreatif, pengembangan kemitraan usaha ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dan meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha ekonomi kreatif.

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dicapai melalui pelaksanaan beberapa program, yaitu:

1. Program Pemasaran Pariwisata
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau (orang)	-	1.783.864	-	325.000	370.500	474.240	1.474.269	1.621.695	1.783.864	3.103	758.154	1.530.899	1.667.081	711,7**	-	0,95	204,63	322,81	113,08	-	-
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	-	2.212.232	-	1.600.000	1.630.000	1.988.600	1.722.943	1.964.155	2.239.136	835.672	817.282	2.212.232	3.491.947	1.717.788**	-	44,12	41,10	111,24	202,67	-	-
3.	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi)	-	2	-	Na	Na	Na	2	2	2	Na	3	2	2	-	-	Na	Na	Na	100	-	-
4.	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor)	-	7	-	Na	Na	Na	7	7	7	Na	3	3	7	-	-	Na	Na	Na	100	-	-
5.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	-	2	-	Na	3	3	2	2	2	Na	1,63	3,95	2,03	-	-	Na	54,33	131,67	101,5	-	-
6.	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	-	100	-	Na	Na	Na	100	100	10	14,28	14,28	80	100	-	-	Na	Na	Na	100	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Miliar Rupiah)	-	5.142,1	-	16.806	3.996,88	5.142,1	*	*	*	2.139	7.147,24	9.740,75	*	*	*	12,72	178,82	189,43	*	*	*
8.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	-	2,4	-	Na	2,3	2,4	*	*	*	2,92	2,32	2,09	*	*	*	Na	100,87	87,08	*	*	*
9.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	-	1,8	-	Na	1,75	1,8	*	*	*	1,81	1,80	1,77	*	*	*	Na	102,86	98,33	*	*	*
10.	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau (%)	-	23,8	-	52	22,70	23,80	*	*	*	37,04	29,78	53,45	*	*	*	71,23	131,19	224,59	*	*	*
11.	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (%)	-	2	-	Na	2	2	*	*	*	Na	2,05	2,3	*	*	*	Na	102,64	115	*	*	*
12.	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%)	-	100	-	Na	100	100	*	*	*	100	100	100	*	*	*	Na	100	100	*	*	*

*tidak dipergunakan lagi pada tahun 2024-2026

**Data sampai Bulan Mei 2025

Dari tabel di atas dapat digambarkan capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2021-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau

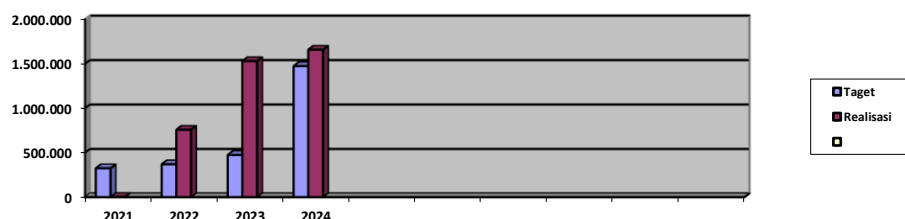
Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau (juta orang) mengalami revisi target pada pelaksanaan perubahan RPJMD dan Renstra, yang awalnya target dibuat pada waktu masa pandemi covid-19. Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau (juta orang) dengan target akhir renstra (tahun 2026) sebanyak 1.783.864 kunjungan wisatawan mancanegara dapat terealisasi 1.658.959 wisatawan mancanegara hingga tahun 2024 atau presentase capaian indikator ini baru mencapai 92,99%. Angka kunjungan wisatawan mancanegara sejak tahun 2021 selalu mengalami trend yang positif hingga tahun 2024 atau setelah selesainya wabah Covid-19.

**Tabel 2.8. Target dan Realisasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau (orang)
Tahun 2021-2024**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1.	2021	325.000	3.103	0,95
2.	2022	370.500	758.154	204,63
3.	2023	474.240	1.530.899	322,81
4.	2024	1.474.269	1.658.959	112,53

Gambar 2.1

Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2024



2. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau

Indikator Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau (juta orang) dengan target akhir renstra (tahun 2026) 2.239.136 orang wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau dapat terealisasi 3.491.947 orang pada tahun 2024 atau 155,95% pada tahun 2024. Angka kunjungan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau selalu mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun hingga capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 yang merupakan angka pelaporan tahun terakhir jumlah pergerakan wisatawan nusantara mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 52,12%.

3. Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan

Indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi) merupakan indikator yang baru digunakan pada revisi RPJMD dan Renstra pada tahun 2024. Hingga disusunnya rencana strategis ini (2025) capaian Indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan baru mencapai 63,63% dari yang ditargetkan, dimana baru 7 (tujuh) Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan dari 11 (sebelas) yang ditargetkan pada periode akhir rencana strategis.

4. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan

Indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor) merupakan indikator yang baru digunakan pada revisi RPJMD dan Renstra pada tahun 2024. Hingga disusunnya rencana strategis ini (2025) capaian Indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan baru mencapai 70% dari yang ditargetkan, dimana baru 7 (tujuh) Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dari 10 (sepuluh) yang ditargetkan pada periode akhir rencana strategis.

5. Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan

Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%) merupakan salah satu indikator yang mengalami perubahan target pada perubahan PRJMD/ Renstra 2021-2026 yang awalnya

target capaiannya 3% menjadi 2% pertahun. Hingga disusunnya rencana strategis ini (2025) capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan baru mencapai 76,1% dari yang ditargetkan, dimana baru 7,61 % (tujuh koma enam puluh satu persen) Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan dari 10 % (sepuluh persen) yang ditargetkan pada periode akhir rencana strategis.

6. Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata

Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%) merupakan indikator yang baru digunakan pada revisi RPJMD dan Renstra pada tahun 2024. Namun demikian dapat dilaporkan bahwasanya pada periode Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 indikator ini tidak selalu bisa tercapai 100%. Pada tahun 2022 Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata hanya mencapai 90 % dan pada tahun 2023 hanya mencapai 70%. Pada tahun 2024 Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata mencapai 100% dimana dari total 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai seluruhnya.

7. Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau

Meningkatnya daya saing pariwisata Kepri di pasar nasional dan internasional dengan indikator Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Miliar Rupiah) dengan target renstra tahun 2022 sebesar 3.996,88 Miliar Rupiah dapat terealisasi 7.147,24 Miliar Rupiah pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 5.142,1 Miliar Rupiah dapat terealisasi 9.740,75 Miliar Rupiah pada tahun 2023. Indikator Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

8. Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara di Kepulauan Riau

Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara di Kepulauan Riau (hari) dengan target renstra tahun 2022 sebesar 2,3 hari dapat terealisasi 2,3 hari. Sedangkan target Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau pada tahun 2023 (2,4 hari) hanya dapat dicapai 2,09 hari atau hanya mencapai 87,08%. Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

9. Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau

Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau (hari) dengan target renstra tahun 2022 sebesar 1,75 hari dapat terealisasi 1,8 hari. Sedangkan target Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara di Kepulauan Riau pada tahun 2023 (1,8 hari) hanya dapat dicapai 1,77 hari atau hanya mencapai 98,33%. Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

10. Rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau

Indikator Rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau (%) dengan target renstra tahun 2022 22,7% dapat terealisasi 29,78%. Indikator Rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 29,78% dapat tercapai 53,45% atau mencapai 224,59%. Indikator Rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

11. Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya

Indikator Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (%) dengan target renstra tahun 2022 sebesar 2% dapat terealisasi 2,05%. Sementara itu Indikator Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya pada tahun 2023 sebesar 2% dapat tercapai 2,3 atau mencapai 115%. Indikator Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

12. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor

Indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (%) dengan target renstra tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor tidak dipergunakan lagi pada perubahan RPJMD dan Renstra pada tahun 2024.

Dari gambaran capaian kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 mengalami revisi, tepatnya di tahun 2024 seiring dengan perubahan RPJMD Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Pada perubahan rencana strategis ada indikator yang dieliminasi, dimodifikasi dan ada indikator baru sebagai pengganti dari indikator sebelumnya. Dari pelaksanaan Rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ada 2 (dua) indikator yang tidak mencapai 100% yaitu rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kepulauan Riau, yang capaiannya pada tahun 2023 masing-masing sebesar 87,08% dan 98,33%. Selebihnya indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai dengan baik seluruhnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD/Renstra urusan pariwisata pada tahun lalu yaitu sebagai berikut: Ketidaktercapaian target indikator rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau tahun 2023 dikarenakan minimnya destinasi wisata baru, begitu juga dengan terbatasnya atraksi wisata yang membuat wisatawan betah berlama-lama untuk tinggal.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau perlu dilaksanakan event-event pariwisata dan membuat destinasi baru, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata. Pelaksanaan event baik skala nasional dan internasional juga diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau harus meningkatkan kerjasama dengan *Stakeholder* pariwisata, baik swasta maupun pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan atraksi wisata, baik atraksi di Daya Tarik Wisata dan atraksi di pusat kota yang terjadwal dengan baik sehingga calon wisatawan dapat merencanakan dengan baik kapan akan bepergian.

Pada pelaksanaan renstra periode 2016-2021 ada beberapa permasalahan, di antaranya ada indikator yang digunakan kurang relevan untuk mengukur programnya. Dari keseluruhan indikator seperti yang telah disampaikan di atas, beberapa di antaranya akan dipergunakan lagi dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (2025-2029) dengan penyempurnaan, sehingga indikator yang akan dipergunakan yaitu:

-
1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang);
 2. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang);
 3. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari);
 4. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)
 5. Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%);
 6. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%);
 7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (%).

Pencapaian indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau seperti telah disampaikan pada subbab sebelumnya. Untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata Kepulauan Riau didukung dana yang berasal dari APBD Kepulauan Riau, yang pada tahun 2022-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024**

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belanja	25.762	26.762	27.718	25.022	26.023	26.240	97,13	97,24	94,67	3,73%	96,31%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2022 anggaran total yang telah dipergunakan hingga tahun ke-3 (tahun 2024) Rencana Strategis dan periode RPJMD adalah sebesar Rp.80.243.282.456,- dengan realisasi sebesar Rp.77.286.056.706,- atau sebesar 96,31%. Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwasanya selama periode Rencana Startegis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,73%.

**Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024**

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.698	760,292	455,11	1.626	687,998	229,62	95,76	90,49	50,45	-47,69	87,30
Program Pemasaran Pariwisata	10.801	13.685	12.822	10.693	13.319	12.060	99,00	97,33	94,06	10,19	96,68
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	329,51	99,44	391,61	324,88	98,80	391,61	98,60	99,4	100	111,99	99,35
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	394,89	228,74	119,26	352,57	208,09	119,26	89,28	90,97	100	-44,96	91,52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.537	11.988	13.929	12.024	11.708	13.439	95,90	95,90	96,48	5,90	96,66

Perkembangan penganggaran per program Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk pencapaian target sasaran dan indikator 2022-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mengalami rata-rata pertumbuhan -47,69%, Program Pemasaran Pariwisata mengalami rata-rata pertumbuhan 10,19%, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengalami rata-rata pertumbuhan 111,99%, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalami rata-rata pertumbuhan -44,96% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,90%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau juga menjalin koordinasi dengan stakeholder bidang pariwisata sebagai mitra di antaranya adalah BPS, asosiasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau (ASITA, PHRI, GIPI, HPI, dll), pokdarwis, desa wisata, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, pelaku usaha pariwisata serta *stakeholder* bidang pariwisata lainnya.

2.1.6. Kerjasama Daerah

Dalam usaha memperkuat promosi dan pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menjalin kerja sama dengan daerah maupun negara lain di antaranya kerjasama bidang pariwisata yang telah dilakukan dengan negara lain adalah dengan negeri Johor, Malaysia. Sementara itu kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Riau adalah kerjasama bidang pariwisata dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan kerjasama pariwisata yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain kerjasama pariwisata dengan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku Utara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya tersebut. Kondisi yang dampaknya signifikan perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan sektor pariwisata meliputi permasalahan pada Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif. Secara umum, permasalahan pada urusan pariwisata tercermin dalam belum optimalnya kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini diikuti dengan penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau, pengeluaran wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan pada urusan pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya konektivitas antar pulau menghambat pergerakan modal dan investasi di Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi kepulauan yang mempunyai Potensi wisata bahari yang melimpah. Dengan kurangnya konektivitas maka destinasi tersebut pun sulit diakses, yang pada akhirnya menghambat pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kepulauan Riau hal ini ditunjukkan bahwa pencapaian indikator rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kepulauan Riau, yang capaiannya pada tahun 2023 masing-masing sebesar 87,08% dan 98,33%.

2. Belum Adanya Acuan Pembangunan Kepariwisataan

Destinasi wisata di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pengembangan obyek-obyek wisata baru. Saat ini Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan sedang dalam proses penyusunan ulang, sementara itu peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional juga telah berakhir masa berlakunya di sisi lainnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPPDA) Provinsi Kepulauan Riau juga telah habis masa berlakunya pada tahun 2022 yang lalu dan harus segera kembali direvisi. Selain itu Dinas Pariwisata juga harus menetapkan kembali Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang akan

menjadi fokus dan perhatian dalam pengembangan pariwisata ke depan. Dengan belum adanya peraturan sebagaimana tersebut di atas Dinas pariwisata belum mempunyai arah yang jelas dalam pengembangan pariwisata ke depan.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata

Fasilitas infrastruktur seperti jalan, transportasi dan akomodasi yang tidak memadai dapat menjadi hambatan bagi pengembangan pariwisata. Dengan fasilitas yang memadai, wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan puas, selain itu fasilitas penunjang juga membantu mempermudah aksesibilitas dan mobilitas para wisatawan di daerah tujuan wisata.

4. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal

Kenyamanan dan kepuasan wisatawan yang berkunjung adalah aspek krusial dalam industri pariwisata. Wisatawan cenderung menyukai wisata yang mempunyai pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai. Pelayanan yang ramah, informasi yang akurat dan layanan yang responsif adalah beberapa hal yang dicari wisatawan. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona dilingkungan daerah wisata memiliki peran dalam mendukung terciptanya iklim kondusif dan terwujudnya sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) sehingga dapat mendorong dalam pengembangan kepariwisataan di objek wisata.

5. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal

Masalah di lapangan menunjukkan bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga di satu pihak kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan di sisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat. Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh, maka diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang

intensif dan kerja sama/ kemitraan yang baik antar pelaku industri pariwisata dalam berbagai wadah organisasi.

6. Insentif bagi pelaku industri pariwisata yang belum optimal

Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pemberian insentif kepada pelaku industri pariwisata. Hal ini tercermin pada pelatihan yang bisa diberikan kepada pelaku industri pariwisata pertahunnya. Selain itu dukungan kepada penyelenggara acara pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau juga masih sangat terbatas.

7. Diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota

Belum adanya jaringan wisata yang terhubung antar daerah yang akan memudahkan wisatawan untuk mengetahui lebih banyak tentang pariwisata di Kepulauan Riau sehingga wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau tidak hanya terkonsentrasi di Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun.

8. Sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal

Banyaknya asosiasi dan organisasi yang bergerak di bidang pariwisata antara lain seperti ASITA, GIPI, PHRI, yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah sehingga menghambat pengembangan *public-private partnerships* hal ini dikarenakan perbedaan tujuan dan kepentingan yang justru menghambat usaha pemerintah dalam memasarkan pariwisata.

9. Strategi komunikasi pemasaran wisata dan kegiatan promosi wisata belum maksimal

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra pariwisata Kepulauan Riau baik di Indonesia maupun di dunia internasional, hal ini dikarenakan banyaknya pemangku kepentingan pariwisata yang belum memiliki kesadaran serta tidak memiliki kemampuan untuk menyikapi trend perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Pelaksanaan event-event yang berskala nasional dan internasional masih sangat terbatas. Selain itu banyak daerah di Kepulauan Riau yang mempunyai event-event daerah yang menarik namun belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaan dan belum mampu mengemas event secara profesional sehingga kemasannya kurang menarik, sehingga event-event

daerah secara pelan-pelan perlu didukung dan didorong agar dapat dikemas secara lebih bagus dan mulai dipromosikan secara nasional maupun internasional.

10. Sumber daya manusia pariwisata yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas

Salah satu tolak ukur daya saing pariwisata dunia adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan diimbangi dengan ketersediaan SDM yang kompeten.

Dalam upaya peningkatan kapasitas kepariwisataan di daerah, perlu mendahulukan prioritas dalam penanganan keterbatasan sumber daya manusia yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memacu pembanguna pariwisata daerah secara.

Selain itu. Keterbatasan sumber daya manusia dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi masalah serius bagi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi Provinsi Kepulauan Riau. Kurangnya kualitas SDM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terlihat dari kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan terampil di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga perlu dilakukan pengembangan terhadap SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi aparat, pengusaha industri pariwisata, karyawan pada industri pariwisata dan masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

11. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif

Koordinasi dan sinkronisasi yang belum efektif antara sektor dan wilayah merupakan masalah umum dalam pengembangan sumber daya manusia dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa alasan mengapa hal ini mungkin belum berjalan efektif adalah ketidakseragaman kebijakan, kurangnya komunikasi dan kolaborasi, ketidakcukupan sumber daya baik finansial maupun manusia.

Untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, langkah yang dapat diambil yaitu pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan dapat membentuk kelompok kerja atau forum yang bertujuan untuk berdiskusi, merencanakan, dan mengkoordinasikan upaya dalam pengembangan sumber daya manusia. Kelompok ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan strategi. Pemangku kepentingan secara bersama-sama dapat mengembangkan rencana aksi lintas sektor dan wilayah yang jelas. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung koordinasi tersedia. Hal ini termasuk alokasi anggaran, fasilitas pelatihan, dan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pentingnya kesadaran tentang manfaat kerja sama lintas sektor dan wilayah penting. Kampanye pendidikan dan informasi dapat membantu mengubah persepsi dan memotivasi pihak-pihak terlibat untuk berpartisipasi.

Koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara sektor dan wilayah adalah kunci untuk mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada daya saing global.

12. Diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif

Masih minimnya pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Hal ini didukung data bahwa rata-rata dilakukan pelatihan pengembangan pelaku ekonomi kreatif pertahunnya. Demikian pula, perlunya perhatian terhadap perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

13. Diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata

Peran ekonomi kreatif sangat diperlukan di daerah wisata, khususnya berkaitan dengan souvenir, pertunjukan, promosi dan lainnya. Dengan

diberdayakannya pelaku ekonomi kreatif di daerah wisata maka secara langsung akan meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat/pelaku ekonomi kreatif di sekitar lokasi pariwisata.

14. Diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran industri kreatif untuk melindungi karyanya serta membutuhkan waktu untuk mendapatkan perlindungan HKI.

15. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi.

Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif. Kurangnya akses permodalan pelaku sektor ekonomi kreatif terhadap perbankan mengakibatkan kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

16. Sarana prasarana ekonomi kreatif belum optimal

Hal ini disebabkan Infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum standar, mahalnya mesin produksi, piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif, kurang riset konten, dan kurang aktivitas pengarsipan konten.

17. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif

Hal ini disebabkan kurangnya apresiasi kreativitas lokal, kurang konektivitas jalur distribusi nasional dan pasar luar negeri, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta.

18. Belum maksimalnya standardisasi terhadap ekonomi kreatif

Permasalahan ini terutama disebabkan belum adanya standardisasi terhadap beberapa sub sektor ekonomi kreatif.

19. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal

Pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara Pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia,

kurangnya kolaborasi lintas komunitas serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik.

2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun.

Perumusan visi Kepulauan Riau memerhatikan potensi unggulan kewilayahan daerah baik secara geografis maupun demografisnya. Potensi maritim. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerahnya Kepulauan Riau mendorong nilai-nilai Budaya Melayu menjadi nilai dasar yang terus melekat di Masyarakat.

Visi dari RPJPD 2025-2045 adalah sebagai berikut : **KEPRI PERMATA BIRU 2045 “PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM, BERBUDAYA MELAYU, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

Misi RPJPD Kepulauan Riau 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera
2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern
4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah

Berdasarkan Visi di atas Urusan Pariwisata mengampu pada misi ke-2 **Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif** dengan fokus pada Pariwisata Berbasis Pesisir.

Melalui pembangunan pariwisata berbasis pesisir diharapkan tercipta beberapa dampak positif berupa peningkatan nilai ekonomi masyarakat pesisir, pendapatan pemerintah, promosi industri lokal, lapangan kerja, dan penyediaan pasar bagi produk-produk lokal. Peluang saat ini adalah Indonesia harus melakukan diversifikasi ke pariwisata berbasis pesisir dan laut karena berpotensi membentuk rantai nilai non-perikanan di wilayah pesisir.

Pada RPJMD Tahap I (2025-2029) salah satu arah kebijakannya adalah **Mewujudkan transformasi ekonomi** dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas, dan (2) **Integrasi Destinasi Batam dan Bintan** dan Penguatan Identitas KTA, (3) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan, (4) Penataan dan restrukturisasi BUMD.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/ diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang.

Kemudian dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan konsep berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) sebagai paradigma pembangunan kepariwisataan Kepulauan Riau.

Konsep *Sustainable Tourism Development* pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip yakni: berwawasan lingkungan, diterima secara sosial dan budaya, layak secara ekonomi dan memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan, meningkatkan dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang serta meningkatkan keseimbangan dalam pembangunan.

Visi Pembangunan Kepulauan Riau 2025-2029:

Visi Kepala Daerah Kepulauan Riau terpilih adalah; “**Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata**”

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2025-2029 meliputi:

- 1. Maju**

Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya arah pembangunan *human capital* mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- 2. Makmur**

Makmur dimaknai sebagai banyak hasil, serba kecukupan atau tidak kekurangan. Masyarakat makmur merupakan masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dalam negara tanpa kesulitan.

- 3. Merata**

Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal.

Misi Pembangunan Daerah 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi “**Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata**”, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah.

Membangun infrastruktur dan transportasi publik dalam menguatkan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan menjangkau Lokasi pelosok dan terisolir. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; air baku ; peningkatan jangkauan listrik perdesaan; pembangunan dan atau perbaikan jalan desa ke sentra-sentra produksi, serta peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.

3. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan berkarakter

Misi ketiga ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kepulauan Riau, agar semakin sehat dan pintar. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang

semakin baik, dan menciptakan masyarakat Kepulauan Riau yang semakin sejahtera.

4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang semakin dinamis berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. Tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditunjukkan oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan demokratis dan terbuka ditandai dengan meningkatnya Indeks Demokrasi Provinsi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan budaya melayu dan nasional. Dalam kaitan ini juga dilakukan penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pembangunan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi,

sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup yang pada akhirnya meningkatkan resiliensi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Dari pernyataan misi tersebut di atas, misi yang berkaitan di mana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Pariwisata yaitu pada **Misi ke-1 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.**

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka proses selanjutnya adalah kebijakan umum dan program. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD. Rumusan kebijakan umum pembangunan dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu perspektif masyarakat atau layanan, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Berdasarkan tujuan Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan serta pencapaian misi ke-1, maka program unggulan pembangunan yang dapat ditunjang oleh Dinas Pariwisata yaitu :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Secara umum pembangunan dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau sudah termasuk dalam program kerja prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2025-2029 sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kepulauan Riau. Namun demikian terkait dengan pelayanan OPD, masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi dan diatasi dalam upaya mencapai tujuan dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah Tujuan : Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Konektifitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar Belum Optimal - Kulititas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai - Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata dan ekonomi kreatif; - Tingkat persaingan dengan daerah lain yang cukup tinggi; - Pemerataan area kunjungan wisatawan masih yang terpusat pada beberapa kawasan pariwisata; - Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal	- Adanya kebijakan nasional berlakunya skema visa khusus yang berlaku di Kepulauan Riau (Bebas visa kunjungan bagi pemegang <i>Permanent Resident</i> (PR) Singapura, Visa kunjungan pendek (<i>short visit visa</i>), bebas visa bagi pemegang <i>Student Pass</i> Singapura, dan Bebas visa bagi pemegang <i>Long Term Visit Pass</i> (LTVP) Singapura; - Letak Geostrategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga - Daya dukung Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia; - Sebagian Aksesibilitas destinasi yang relatif mudah dan baik;

2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Strategis Kabupaten/ Kota maupun RT/RW. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan *linkage* dalam pembangunan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Saat ini baik rencana strategis Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif belum ditetapkan sehingga belum bisa dilakukan telaah terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong maupun menghambat pencapaian tujuan dan sasaran baik Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Ekonomi Kreatif.

Namun demikian sesuai dengan Perpres nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 telah ditetapkan Indikator dan target yang diemban baik oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Sasaran Kementerian Pariwisata adalah Meningkatnya nilai tambah pariwisata dengan indikator Rasio PDB Pariwisata (%) dan Devisa Pariwisata (Miliar USD), sementara sasaran Kementerian Ekonomi Kreatif adalah meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan Indikator Proporsi Ekonomi Kreatif (%).

Indikator Program Prioritas Kementerian Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara
2. Tenaga Kerja Pariwisata
3. Indeks Pembangunan Pariwisata (*travel & tourism index*)
4. Kunjungan wisatawan mancanegara
5. Perjalanan wisatawan nusantara

Sementara itu Indikator Program Prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif
2. Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif
3. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
4. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif

Tabel 2.12. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata

No	Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran : Meningkatnya nilai tambah pariwisata yang diukur dengan; 1. Rasio PDB Pariwisata (%) 2. Devisa Pariwisata (Miliar USD)	- Kurangnya konektivitas antar pulau menghambat pergerakan modal dan investasi di Kepulauan Riau - Belum Adanya Acuan Pembangunan Kepariwisata - Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata - Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal - Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal	- Kualitas dan kuantitas daya tarik destinasi wisata belum memadai - Kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan wisata; - Tingkat persaingan dengan negara lain sangat tinggi; - Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata dan	- Adanya kebijakan nasional berlakunya skema visa khusus yang berlaku di Kepulauan Riau (Bebas visa kunjungan bagi pemegang <i>Permanent Resident (PR)</i> Singapura, Visa kunjungan pendek (<i>short visit visa</i>), ebas visa bagi pemegang <i>Student Pass</i> Singapura, dan Bebas visa bagi pemegang <i>Long Term Visit Pass (LTVP)</i> Singapura; - Letak Geostrategis
	Indikator Program Prioritas : 1. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2. Tenaga Kerja Pariwisata 3. Indeks Pembangunan Pariwisata (<i>travel&tourism index</i>) 4. Kunjungan wisatawan mancanegara 5. Perjalanan wisatawan nusantara			

No	Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Insentif bagi pelaku industri pariwisata yang belum optimal - Diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota - Strategi komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu - Sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal - Sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal - Kegiatan promosi wisata belum maksimal - Sumber daya manusia pariwisata yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas - Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif	ekonomi kreatif belum optimal - Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi komunitas masyarakat	Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga - Daya dukung Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia; - Sebagian Aksesibilitas destinasi yang relatif mudah dan baik; - Keanekaragaman destinasi wisata yang cukup banyak; - kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi alam mengembangkan potensi aset pariwisata - Isu dan permasalahan kepariwisataan menjadi isu global yang menjadi perhatian lintas Negara dan mancanegara

Tabel 2.13. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif

No	Sasaran Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran : Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif yang diukur dengan; Proporsi Ekonomi Kreatif (%)	- Diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif - Diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata - Diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif - Belum optimalnya kerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi - Sarana prasarana ekonomi kreatif belum optimal - Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif - Belum maksimalnya standardisasi terhadap ekonomi kreatif - Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal	- Urusan ekonomi kreatif belum ditangani secara maksimal - Kualitas dan kuantitas SDM ekonomi kreatif belum mendukung sepenuhnya dalam peningkatan pelayanan; - Tingkat persaingan dengan negara lain sangat tinggi; - Kerjasama antar sektor/instansi dalam pengembangan ekonomi kreatif belum optimal	- Letak Geostrategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga - Banyaknya potensi ekonomi kreatif di Kepulauan Riau;
	Indikator Program Prioritas 1. Laju pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 2. Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif 3. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 4. Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif			

2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Arahan pembangunan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau menempatkan posisi kebudayaan dan pariwisata pada zona atau kawasan budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya. Adapun strategi pengembangannya dilaksanakan melalui upaya-upaya melestarikan obyek wisata, memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan. Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan pariwisata sebagaimana tersebut di atas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pariwisata di masa mendatang.

Dalam pendekatan ini yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan pariwisata dalam suatu wilayah adalah :

1. Fungsi Wilayah

Pada awalnya suatu wilayah diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga fungsi-fungsi wilayah kebanyakan dilihat dari tujuan awal wilayah tersebut. Namun fungsi-fungsi ini dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

2. Perspektif Tata Ruang Wilayah

Didalam pengemasan destinasi pariwisata terlebih dahulu perlu memahami bentuk penataan suatu wilayah yang akan dijadikan tujuan wisata. Elemen-elemen yang perlu dipahami dalam pengembangan destinasi pariwisata adalah peta dasar, survai tata guna lahan sekarang, pendaerahan yang telah ditetapkan, pola pemilikan lahan, jaringan jalan dan sarana transportasi, pelayanan utilitas umum (terutama saluran limbah dan air bersih), fasilitas umum dan pelayanan masyarakat yang ada.

Dalam hal ini, maka RTRW dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan panduan dalam pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. RTRW, dan RPJMD, Provinsi Kepulauan Riau memuat beberapa muatan rencana yang secara substansial akan terkait dengan rencana pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. Rencana Pemanfaatan Ruang yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya dan kawasan lindung akan mengindikasikan penyebaran lokasi aktivitas pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau pada masa yang datang, diantaranya adalah kawasan perdagangan dan jasa yang terkait dengan pariwisata, pengembangan kawasan pusat pengembangan baru, dan lain-lain.
- b. Rencana pengembangan prasarana dan sarana. Hal ini terkait juga dengan informasi pengembangan prasarana dan sarana pada masa yang akan datang yang akan mempengaruhi pentahapan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Rencana Pengembangan Sistem transportasi yang memuat rencana pengembangan jaringan transportasi yang merupakan salah satu komponen *supply side* dalam pariwisata. Dalam konteks pariwisata, rencana pengembangan sistem transportasi yang dirumuskan akan membentuk

gateway ke Provinsi Kepulauan Riau sebagai aksesibilitas eksternal, maupun sistem jaringan yang akan menghubungkan komponen-komponen dalam sistem pariwisata, yaitu yang menghubungkan antar kantong-kantong pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Arah pengembangan pariwisata pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 dijabarkan dalam misi pertama yaitu Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.

Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh laut memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Potensi kawasan *geopark* di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di berbagai wilayah sehingga menjadi daya tarik wisata tersendiri. Oleh karena itu upaya untuk membangun sistem pariwisata yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan wisata dan peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif.

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun ditentukan pentahapan pengembangan pariwisata Kawasan BBK secara periodik. Pentahapan berfokus pada lima klaster strategi yang secara berkesinambungan melakukan transformasi pengembangan pariwisata Kawasan BBK. Klasterisasi tema pariwisata ditentukan berdasarkan dampak pengganda dan kompleksitas pengembangan destinasi. Kawasan Batam dan Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan pariwisata berskala internasional yang didukung oleh Tanjungpinang dan Karimun. Beberapa tema kepariwisataan ditetapkan sebagai strategi prioritas dan strategi utama karena memiliki bangkitan ekonomi tinggi. Dalam pengembangannya dipersiapkan pula perencanaan terkait infrastruktur penunjang, SDM, dan investasi.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota pada urusan pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kota Tanjungpinang

Pada urusan pariwisata pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai wisata Budaya Melayu dan industri halal. Dengan fokus pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya

Melayu. Selain itu pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang juga difokuskan pada fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

Sedangkan menurut Perpres Nomor 1 Tahun 2024 Kawasan Tanjungpinang diarahkan pada sektor wisata warisan budaya, industri halal, perikanan, dan pusat perdagangan dan jasa.

Pengembangan Pariwisata Kota di Tanjungpinang diarahkan untuk klaster warisan budaya dan kuliner. Kegiatan berfokus pada kunjungan sejarah dan budaya di Tanjungpinang dengan mengintegrasikan ODTW warisan budaya berupa bangunan cagar budaya, bangunan peribadatan vihara/klenteng, pasar kuliner (akau) serta ragam budaya Melayu dan Tionghoa dengan tema berupa:

a. Wisata *Heritage* dan Budaya Melayu Tanjungpinang

Budaya di Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang memiliki sejarah sangat kuat dengan kebudayaan melayu zaman Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dengan Pulau Penyengat sebagai pusatnya. Perencanaan wisata Tanjungpinang dikembangkan sebagai “imperium kebudayaan melayu”.

b. Wisata Warisan Budaya Tionghoa Tanjungpinang

Kebudayaan Tanjungpinang tidak terlepas dari hubungannya dengan kebudayaan Tionghoa. Wisata warisan budaya Tionghoa merupakan potensi besar mengingat adanya pergerakan wisatawan asal Tiongkok yang memiliki kedekatan kultural. Pengembangan difokuskan di Senggarang dan Kota Lama Tanjungpinang dalam bentuk penyelenggaraan paket wisata warisan budaya.

Kawasan Budaya Melayu dan Tionghoa di Tanjungpinang terpusat di kawasan kota tua Tanjungpinang. Potensi wisata di kawasan ini masih belum teroptimalkan dengan baik. Beberapa strategi desain yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan budaya pecinan untuk meningkatkan daya tariknya sebaik kawasan wisata.

2. Kabupaten Bintan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional. Kabupaten Bintan memiliki kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong

dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan difokuskan pada pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional, serta pengembangan pusat pelatihan vokasi sektor pariwisata.

Untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Bintan lebih difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata, industri perawatan dan perbaikan pesawat, industri pengolahan logam dasar (alumina), pengolahan makanan, pertahanan maritim, dan olahraga Kabupaten Bintan ditargetkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional yang terintegrasi sebagai Hub Pariwisata Global di Indonesia bagian barat. Bintan sebagai destinasi utama Kepulauan Riau telah memiliki segmen pasar spesifik, yakni 89,29 persen adalah turis mancanegara. Diversifikasi pariwisata dan rencana integrasi diharapkan dapat memperluas segmen pasar untuk meningkatkan lebih banyak kunjungan turis mancanegara dan memperluas pasar domestik. Destinasi baru dari atraksi potensial perlu dikembangkan, khususnya ekowisata, olahraga, warisan budaya, kuliner, *event* hingga *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* (MICE). Integrasi pariwisata di Pulau Bintan harus didukung dengan pengembangan infrastruktur konektivitas pariwisata, baik bandara, pelabuhan, dan jalan lintas kawasan.

Diversifikasi produk dan paket wisata diharapkan memberikan pengalaman menyeluruh bagi wisatawan untuk mencapai visi pengalaman berwisata dengan kualitas tinggi. Klaster resort, pantai, olahraga dan MICE di koridor Lagoi difungsikan sebagai hub utama pariwisata Pulau Bintan yang didukung oleh Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di klaster lain sebagai area pendukung baik koridor Trikora-Gunung Bintan-Pulau Pulau Timur Bintan serta koridor Tanjungpinang.

Trikora - Pulau-pulau Timur Bintan Kegiatan berfokus pada daya tarik wisata alam dan buatan dengan ekowisata terintegrasi darat dan laut yang meliputi mangrove di Bintan, Gunung Bintan, pesisir Trikora, serta pulau-pulau lepas pantai timur Bintan. Ekowisata terintegrasi antara wilayah daratan (gunung dan hutan) serta wilayah pesisir (pantai dan pulau) direncanakan untuk mendorong

kepariwisataan yang ramah lingkungan (*responsible tourism*), inklusif dan berkontribusi terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pengembangan ekowisata *mangrove* dilaksanakan secara terintegrasi dengan rencana konservasi *mangrove*. Kegiatan ekowisata *mangrove* terintegrasi dengan paket wisata Kawasan Lagoi untuk tiga lokasi di Bintan, yakni Tanjung Berakit, Teluk Bintan yang meliputi Teluk Sebong, Teluk Busung dan Teluk Penaga serta Sei Kecil. Ekowisata memfokuskan pada pariwisata berwawasan lingkungan untuk edukasi lingkungan, pengenalan keanekaragaman hayati, dan jelajah alam di ekosistem *mangrove*.

Sementara itu Ekowisata Gunung Bintan memfokuskan wisata alam dan jelajah dengan target wisatawan spesifik pegiat *outdoor*, olahraga alam dan tantangan. Ekowisata mempromosikan olahraga alam *Tracking, Hiking* dan *Camping* (THC) yang dipadukan dengan aktivitas pelestarian alam dan satwa. Pengembangan Trikora dengan konsep wisata bahari dan budaya tradisi melaut untuk menghindari kejenuhan tipe atraksi pantai kelas premium di Lagoi. Posisi Trikora yang strategis sepanjang Lintas Timur juga dikembangkan sebagai simpul transportasi laut yang menghubungkan Bintan dengan pulau di sisi timur. Ekowisata pesisir Trikora diarahkan untuk tidak berkembang secara sporadik namun harus terintegrasi dalam pengelolaan kawasan yang dikerjasamakan secara strategis dengan badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah maupun investasi swasta. Pengembangan pulau-pulau timur Bintan ditargetkan untuk Pulau Mapur, Pulau Nikoi, Pulau Pangkil dan Pulau Beralas Pasir yang dikelola swasta. Pengembangan diarahkan sebagai destinasi pantai dan pulau yang dilengkapi *private resort* bernuansa tropis, fasilitas olahraga pantai, memancing dan menyelam (*diving*).

3. Kota Batam

Sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2024 Tema pengembangan Kawasan Batam diposisikan sebagai hub logistik internasional perdagangan melalui sistem elektronik, industri kedirgantaraan, industri ringan dan bernilai (peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga), industri digital dan kreatif, pusat perdagangan dan keuangan internasional, dan wisata kesehatan terpadu.

Kawasan prioritas wilayah Nongsa, Kabil, dan Hang Nadim diarahkan untuk pengembangan industri digital dan kreatif, wilayah Sekupang diarahkan untuk wisata kesehatan terpadu, wilayah Rempang untuk pengembangan wisata pantai dan agrowisata, wilayah Galang dan Galang Baru untuk pengembangan taman hiburan, wisata sejarah, dan wisata alam.

Kawasan Pariwisata menjadi salah satu daya tarik investasi di Kawasan Batam. Kawasan Batam memiliki kelengkapan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kawasan BBK. Sektor pariwisata yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan berkualitas internasional akan memiliki potensi besar.

Kawasan dengan kegiatan utama pariwisata di Kawasan Batam dan sekitarnya adalah Kawasan Pariwisata Pulau Pengalap, Kawasan Pariwisata Pulau Ranoh, Kawasan Pariwisata Pulau Abang Besar. Kawasan pariwisata Kepri Coral yang terdapat di Pulau Pengalap, Pulau Ranoh dan Pulau Abang Besar akan direncanakan sebagai Kawasan Pariwisata.

4. Kabupaten Karimun

Tema Utama Pengembangan kawasan Karimun diperuntukkan untuk mendukung visi pengembangan Kawasan BBK, maka Kawasan Karimun dan sekitarnya dikembangkan dengan bisnis unggulan Industri Maritim, Industri Penampungan Minyak, Industri Teknologi Pertanian, Industri Perikanan, dan Pariwisata.

Kawasan Pariwisata Karimun memiliki sejumlah obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan tingkat pemanfaatan dan pola pengelolaannya. Wilayah Pulau Telunas, Pulau Sugi dan kepulauan di sekitarnya dikembangkan sebagai Kawasan Pariwisata Internasional. Potensi Pariwisata Karimun didukung oleh kondisi geografis yang dapat dijadikan tujuan utama sebagai tujuan wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Karimun adalah obyek wisata alam, wisata sejarah, dan agrowisata yang tersebar di beberapa wilayah.

5. Kabupaten Lingga

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut,

dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga dipusatkan pada pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya, serta fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

6. Kabupaten Natuna

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai Setanau dan Sengiap, Pantai Teluk Depih, Pantai Batu Kasah, Pantai Teluk Selahang, Pantai Teluk Buton, Pantai Sisi, Pulau Kembang, Batu Seduyung, dan Batu Catur.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna difokuskan pada pembangunan wisata bahari.

7. Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun, Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong, Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau

Rengok, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. Pada sektor pariwisata, kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada pengembangan wisata bahari dan ekowisata berstandar internasional, serta fasilitasi dan pengembangan UMKM.

2.2.4.2. Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Terkait dengan bidang kepariwisataan dititikberatkan pada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur yang mendukung kepariwisataan dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan yang akan datang. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Dimana tujuan pembangunan berkelanjutan terkait sektor pariwisata adalah “Pada Tahun 2030, Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan

Untuk Mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan Yang Menciptakan Lapangan Kerja Dan Mempromosikan Budaya Dan Produk Lokal”.

2.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Sektor pariwisata di dalam Rencana Pembangunan Nasional telah ditargetkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau sendiri juga telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional.

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 terkait pembangunan Pariwisata di Kepulauan Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan dapat digambarkan masing-masing program sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola kepariwisataan, belum adanya *grand design* pembangunan kepariwisataan, belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal, dan sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal. Program yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata minimnya penyelenggaraan even pariwisata daerah, diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata, diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar lembaga dan antar kabupaten dan kota, strategi komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu, sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal, dan kegiatan promosi wisata masih belum maksimal. Permasalahan dan isu isu terkait pemasaran pariwisata merupakan fokus perhatian dan memerlukan upaya peningkatan yang akan dilaksanakan melalui Program Pemasaran

Pariwisata.

3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif sumber daya manusia pariwisata baik dari industri pariwisata maupun SDM Aparatur Pemerintah Daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif. Penyelesaian permasalahan pada sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ini dilakukan Upaya Peningkatan dan usaha melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan ekonomi kreatif merupakan isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan di antaranya masih diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif, diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata, diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, belum adanya standardisasi terhadap ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal. Permasalahan dan isu tersebut akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu **“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”** serta visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang merumuskan misi ke dalam 5 (lima) agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang terkait dengan pariwisata pada misi pertama yaitu; **“Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah”** dalam rangka meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar nasional dan internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Tujuan RPJMD 2025-2029 terkait urusan pariwisata adalah Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah, sedangkan Sasaran RPJMD 2025-2029 terkait urusan pariwisata yaitu Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, dengan indikator kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%).

Tujuan, Sasaran, dan indikator jangka menengah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan pada tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata											
- Meningkatkan kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,90	2,00	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (SBM/Milyar Rupiah)	15.932,37	17.620,25	19.366,61	21.279,33	23.373,96	25.667,50	28.178,52	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	0	2,65	2,68	2,71	2,74	2,77	2,80	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran.

Strategi pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Akselerasi daya saing pariwisata	Pengembangan daya saing pariwisata	Penguatan daya saing pariwisata	Pemantapan daya saing pariwisata	Perwujudan daya saing pariwisata
		Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	- Penguatan Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Kepulauan Riau - Diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan - Peningkatan kapasitas	- Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman - Diversifikasi objek wisata - Fasilitasi Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif - Peningkatan kapasitas pelaku	- Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri - Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Pariwisata - Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara	- Menciptakan iklim usaha yang kondusif. - Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri - Meningkatkan daya saing usaha ekonomi kreatif; - Penguatan kolaborasi berbasis	- Meningkatkan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri - Perluasan pasar ekonomi kreatif baik dalam maupun luar negeri

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
				TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatkan promosi wisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi	pariwisata dan ekonomi kreatif - Pengembangan <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri - Peningkatan kualitas destinasi pariwisata	inklusif dan berkelanjutan - Meningkatkan kapasitas kepariwisataan bagi aparat pemerintah daerah	<i>Hexahelix</i> (pemerintah, industri, media, akademisi, hukum dan regulasi serta komunitas/ masyarakat)	

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing	1. Menyusun regulasi pengembangan destinasi Kepulauan Riau 2. Peningkatan sarana prasarana pariwisata maritim 3. Pengadaan dan rehabilitasi sarana parasarana destinasi pariwisata 4. Menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Lintas Sektor 5. Pelaksanaan <i>crosscutting</i> pembangunan dengan lintas OPD dan <i>stakeholder</i> lainnya 6. Peningkatan daya saing Produk ekonomi kreatif diwujudkan	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha ekonomi kreatif 7. Pengadaan sarana prasarana kota kreatif 8. Mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.	
				Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis	1. Penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif tahunan 2. Peningkatan intensitas promosi Bersama pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>joint promotion</i>) dengan Kabupaten/Kota maupun dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Penguatan struktur Industri ekonomi kreatif diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hirarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri ekonomi kreatif; 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Fasilitasi sertifikasi profesi bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif 2. Penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Optimalisasi peran dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kelembagaan dan Penguatan Kualitas dan kapasitas SDM ekonomi kreatif 4. Pelatihan kepariwisataan bagi aparatur pemerintah daerah	
				Pemanfaatan budaya lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata	1. Pelaksanaan even berbasis budaya daerah dalam upaya melestarikan dan mempromosikan warisan budaya daerah serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat 2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan local	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

Berdasarkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sejenis dan erat terkait.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan kegiatan/sub kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan/sub kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya,

baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan daerah Kepulauan Riau untuk meningkatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif disertai peningkatan daya saing pariwisata maka guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan, melalui kebijakan peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan inovasi produk, kekuatan pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata serta sinergitas antar pelaku wisata. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2025-2029 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daya Tarik, Kawasan strategis, dan destinasi wisata sehingga mampu mewujudkan destinasi pariwisata yang bersaing di pasar nasional dan internasional sehingga dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau baik di dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Yaitu dengan memaksimalkan kinerja pemasaran pariwisata daerah Kepulauan Riau dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, serta yang intensif, inovatif, dan interaktif.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini juga bertujuan mewujudkan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan ekonomi kreatif secara profesional, efektif dan efisien.

d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan produk-produk ekonomi kreatif Provinsi Kepulauan Riau baik di dalam maupun luar negeri, meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar nasional dan internasional, mewujudkan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelaku ekonomi kreatif.

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi diperlukan program-program pendukung. Program pendukung untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di Dinas Pariwisata antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pelayanan dan sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada dasarnya program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mendukung program-program sektor lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pariwisata akan mempunyai *multiplier effects* yang menguntungkan semua sektor pembangunan. Pengelolaan pariwisata yang baik akan menjadi lahan subur bagi penciptaan lapangan kerja baru dalam bidang usaha transportasi, penginapan, penyediaan makanan, dan jasa lainnya.

Di lain pihak, pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Riau juga memerlukan dukungan program dari sektor atau instansi lain, di antaranya: Program Penataan Bangunan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengembangan UMKM, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Pengelolaan Pelayaran, dan juga Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan suatu program perlu ditetapkan dengan indikator dan penetapan kinerja. Penetapan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program sektor pariwisata setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun yang diinginkan pada akhir periode Renstra yang dapat dicapai. Indikator kinerja OPD secara teknis pada dasarnya dapat dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program pariwisata periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikasi rencana program prioritas Dinas Pariwisata berisi program-program untuk mencapai visi dan misi RPJMD. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan/ sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing bidang sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Pada tabel di bawah ini digambarkan perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Pariwisata, dimana Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata							
- Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
					Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (SBM/Milyar Rupiah)		
					Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.26.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.26.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.26.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.26.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.26.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.01.0001 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.01.0005 - Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	3.26.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
					Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.26.02.1.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Laporan)	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	3.26.02.1.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Laporan)	3.26.02.1.02.0008 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi (Dokumen)	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Dokumen)	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.1.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Lokasi)	3.26.02.1.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi (Dokumen)	3.26.02.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (Dokumen)	3.26.02.1.03.0013 - Fasilitas Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	
				Terlaksananya Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	3.26.02.1.04.0009 - Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
					Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.1.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	3.26.04.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	
				Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.1.02.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.1.02.0012 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
					Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.1.02.0014 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	3.26.04.1.02.0017 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	3.26.04.1.02.0019 - Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.1.01.0004 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.1.01.0008 - Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	3.26.05.1.01.0016 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	3.26.05.1.01.0018 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.1.02.0007 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

Daftar rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta rencana pendanaan indikatif dalam mencapai kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi pijakan penyusunan Renja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2030, diuraikan secara rinci pada tabel 4.2. sebagai berikut:

**TABEL 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				24.166.938.329,94		25.555.446.601,94		27.555.446.601,94		29.555.446.601,94		35.555.446.601,94		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.626.938.329,94		15.555.446.601,94		15.555.446.601,94		15.555.446.601,94		15.555.446.601,94		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	15.626.938.329,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	3.26.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0,00	83,58		83,58		83,68		83,68		83,80			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,86	88,95		89,00		89,15		89,30		89,50			
3.26.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	5		5		5		5		5			
3.26.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	5	150.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		48.181.600,00		48.181.600,00		48.181.600,00		48.181.600,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	50.000.000,00	5	48.181.600,00	5	48.181.600,00	5	48.181.600,00	5	48.181.600,00		
3.26.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		51.818.400,00		51.818.400,00		51.818.400,00		51.818.400,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	51.818.400,00	1	51.818.400,00	1	51.818.400,00	1	51.818.400,00		
3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.065.446.601,94		13.065.446.601,94		13.065.446.601,94		13.065.446.601,94		13.065.446.601,94		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	13.065.446.601,94	1	13.065.446.601,94	1	13.065.446.601,94	1	13.065.446.601,94	1	13.065.446.601,94		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	72		72		72		72		72			
3.26.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.541.654.601,93		12.541.654.601,93		12.541.654.601,93		12.541.654.601,93		12.541.654.601,93		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93		
3.26.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				513.792.000,01		513.792.000,01		513.792.000,01		513.792.000,01		513.792.000,01		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01		
3.26.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.26.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				375.400.000,00		375.400.000,00		375.400.000,00		375.400.000,00		375.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3	375.400.000,00	3	375.400.000,00	3	375.400.000,00	3	375.400.000,00	3	375.400.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10		10		10		10		10			
3.26.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				275.400.000,00		275.400.000,00		275.400.000,00		275.400.000,00		275.400.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	3	275.400.000,00	3	275.400.000,00	3	275.400.000,00	3	275.400.000,00	3	275.400.000,00		
3.26.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.052.031.680,00		838.539.950,00		838.539.950,00		838.539.950,00		838.539.950,00		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1.052.031.680,00	2	838.539.950,00	2	838.539.950,00	2	838.539.950,00	2	838.539.950,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.26.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
3.26.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	112.000.000,00	2	112.000.000,00	2	112.000.000,00	2	112.000.000,00	2	112.000.000,00		
3.26.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				790.031.680,00		576.539.950,00		576.539.950,00		576.539.950,00		576.539.950,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	790.031.680,00	12	576.539.950,00	12	576.539.950,00	12	576.539.950,00	12	576.539.950,00		
3.26.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
3.26.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				436.251.728,00		478.251.700,00		478.251.700,00		478.251.700,00		478.251.700,00		
Pemerintahan Daerah														
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	436.251.728,00	12	478.251.700,00	12	478.251.700,00	12	478.251.700,00	12	478.251.700,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.26.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				63.760.000,00		105.760.000,00		105.760.000,00		105.760.000,00		105.760.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	63.760.000,00	12	105.760.000,00	12	105.760.000,00	12	105.760.000,00	12	105.760.000,00		
3.26.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				357.491.728,00		357.491.700,00		357.491.700,00		357.491.700,00		357.491.700,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	357.491.728,00	12	357.491.700,00	12	357.491.700,00	12	357.491.700,00	12	357.491.700,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				297.808.320,00		297.808.350,00		297.808.350,00		297.808.350,00		297.808.350,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	50	297.808.320,00	50	297.808.350,00	50	297.808.350,00	50	297.808.350,00	50	297.808.350,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.26.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				111.224.000,00		111.224.000,00		111.224.000,00		111.224.000,00		111.224.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	111.224.000,00	2	111.224.000,00	2	111.224.000,00	2	111.224.000,00	2	111.224.000,00		
3.26.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				145.074.000,00		145.074.000,00		145.074.000,00		145.074.000,00		145.074.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	145.074.000,00	6	145.074.000,00	6	145.074.000,00	6	145.074.000,00	6	145.074.000,00		
3.26.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.510.320,00		41.510.350,00		41.510.350,00		41.510.350,00		41.510.350,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	50	41.510.320,00	50	41.510.350,00	50	41.510.350,00	50	41.510.350,00	50	41.510.350,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				660.000.000,00		1.150.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		2.200.000.000,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,89	1,95	660.000.000,00	2,00	1.150.000.000,00	2,05	700.000.000,00	2,10	600.000.000,00	2,15	2.200.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.00 - Dinas Pariwisata	
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,64	1,70		1,75		1,80		1,85		1,90			
3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				310.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		1.150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	0	1	310.000.000,00	1	350.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	2	1.150.000.000,00		
	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	25		25		25		25		100			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	0	0		3		0		0		0			
	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1	7		7		7		7		7			
3.26.02.1.01.0001 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (Lokasi)	0	0	0,00	3	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.1.01.0005 - Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi (Lokasi)	0	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	500.000.000,00		
3.26.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				70.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi (Laporan)	1	7	70.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	150.000.000,00		
3.26.02.1.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	100	500.000.000,00		
3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		500.000.000,00		
Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis	0	0	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pariwisata Provinsi (Laporan)													
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	0	2		0		0		0		2			
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	0	0		25		25		25		50			
	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	0	0		5		0		0		0			
3.26.02.1.02.0001 - Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Lokasi)	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	200.000.000,00		
3.26.02.1.02.0008 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Laporan)	0	0	0,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	100.000.000,00		
3.26.02.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan (Orang)	0	0	0,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	50	200.000.000,00		
3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				100.000.000,00		550.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0	100.000.000,00	2	550.000.000,00	0	200.000.000,00	0	100.000.000,00	0	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	0		1		0		0		0			
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Lokasi)	0	1		1		1		1		2			
	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Dokumen)	0	0		1		1		0		1			
3.26.02.1.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0	0,00	2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.1.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (Lokasi)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
3.26.02.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.02.1.03.0013 - Fasilitas Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00		
3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	30	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.1.04.0009 - Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		
Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Unit Usaha)	30	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	250.000.000,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				6.464.000.000,00		4.935.000.000,00		6.535.000.000,00		9.975.000.000,00		13.075.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	1.667,1	2.722,6	6.464.000.000,00	2.947,4	4.935.000.000,00	3.172,2	6.535.000.000,00	3.397,0	9.975.000.000,00	3.621,8	13.075.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata	
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Perjalanan)	3.491.947	3.512.500		3.525.750		3.539.850		3.565.550		3.606.151			
3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				6.464.000.000,00		4.935.000.000,00		6.535.000.000,00		9.975.000.000,00		13.075.000.000,00		
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10	15	6.464.000.000,00	10	4.935.000.000,00	15	6.535.000.000,00	15	9.975.000.000,00	15	13.075.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	33	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1.164.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		3.800.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	33	5	1.164.000.000,00	5	1.150.000.000,00	5	1.150.000.000,00	5	1.150.000.000,00	5	3.800.000.000,00		
3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.26.03.1.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5.300.000.000,00		3.735.000.000,00		5.335.000.000,00		8.775.000.000,00		9.025.000.000,00		



Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	10	15	5.300.000.000,00	10	3.735.000.000,00	15	5.335.000.000,00	15	8.775.000.000,00	15	9.025.000.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				800.000.000,00		2.100.000.000,00		2.900.000.000,00		1.300.000.000,00		2.550.000.000,00		
Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	2,22	6,54	800.000.000,00	8,42	2.100.000.000,00	10,31	2.900.000.000,00	12,19	1.300.000.000,00	14,08	2.550.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata	
3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				200.000.000,00		600.000.000,00		1.000.000.000,00		300.000.000,00		850.000.000,00		
Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	0	0	200.000.000,00	1	600.000.000,00	0	1.000.000.000,00	0	300.000.000,00	1	850.000.000,00		
	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	0	1		0		1		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	0	0		1		0		1		1			
3.26.04.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif (Laporan)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00		
3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				0,00		300.000.000,00		0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula (Laporan)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				200.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		0,00		350.000.000,00		
Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00	0	0,00	1	350.000.000,00		
3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				600.000.000,00		1.500.000.000,00		1.900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	600.000.000,00	1	1.500.000.000,00	0	1.900.000.000,00	0	1.000.000.000,00	0	1.700.000.000,00		
	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah terlaksananya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0		1		0		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran				0,00		200.000.000,00		0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.26.04.1.02.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
3.26.04.1.02.0012 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual (Orang)	0	50	150.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00		



Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04.1.02.0014 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
3.26.04.1.02.0017 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.04.1.02.0019 - Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				616.000.000,00		1.815.000.000,00		1.865.000.000,00		2.125.000.000,00		2.175.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	7,61	11,61	616.000.000,00	13,61	1.815.000.000,00	15,61	1.865.000.000,00	17,61	2.125.000.000,00	19,61	2.175.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata	
3.26.05.1.01- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				616.000.000,00		1.440.000.000,00		1.490.000.000,00		1.750.000.000,00		1.750.000.000,00		
Terlaksanakanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0	616.000.000,00	1	1.440.000.000,00	1	1.490.000.000,00	1	1.750.000.000,00	1	1.750.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	0	25		50		50		70		70			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	64	240		250		250		250		250			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0	0		100		100		200		200			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.1.01.0004 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				466.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	64	240	466.000.000,00	250	550.000.000,00	250	550.000.000,00	250	550.000.000,00	250	550.000.000,00		
3.26.05.1.01.0008 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	0	0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	0	25	100.000.000,00	50	120.000.000,00	50	120.000.000,00	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00		
3.26.05.1.01.0016 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				0,00		220.000.000,00		220.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0	0	0,00	100	220.000.000,00	100	220.000.000,00	200	450.000.000,00	200	450.000.000,00		
3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
3.26.05.1.01.0018 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				50.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				0,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		425.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	100	375.000.000,00	100	425.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0		50		50		50		50			
3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00		
3.26.05.1.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	0	0,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	200.000.000,00		

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada urusan pariwisata adalah: Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Transformasi Ekonomi Berbasis Pertumbuhan yang Berkualitas dan Peningkatan Investasi.

Rencana implementasi program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan tahun 2025-2030 beserta nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau secara detail dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut:

TABEL 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
			3.26.02.1.01.0005 - Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	
			3.26.02.1.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	
			3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.03.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	
			3.26.02.1.03.0013 - Fasilitas Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			3.26.02.1.04.0009 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	
2.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			3.26.03.1.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
3.	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
			3.26.04.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	
			3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
			3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	
			3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	
			3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
			3.26.04.1.02.0014 - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
4.	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
			3.26.05.1.01.0004 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
			3.26.05.1.01.0008 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			3.26.05.1.01.0016 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
			3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
			3.26.05.1.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra OPD. Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD dan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan indikator kinerja OPD yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang (tahun 2025-2029) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja diperlukan oleh publik dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata di Kepulauan Riau.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 4.4. berikut:

Table 4.4. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Pariwisata									
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,9	2	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52	
3.	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	SBM/Milyar Rupiah	15.932,37	17.620,25	19.366,61	21.279,33	23.373,96	25.667,5	28.178,52	

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja Kunci (IKK) adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah atau kegiatan tertentu. IKK berfungsi sebagai penunjuk atau metrik untuk mengevaluasi pencapaian target, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam hal ini, IKK membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Dengan merumuskan indikator kinerja kunci, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja kunci juga dapat meningkatkan kinerja instansi untuk ke depannya. Sehingga instansi tersebut bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

. Indikator kinerja Kunci pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagaimana tabel 4.5. berikut:

**TABEL 4.5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	positif	Hari	1,89	1,9	1,95	2	2,05	2,1	2,15	
3.	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	positif	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
4.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	positif	%	2,22	4,65	6,54	8,42	10,31	12,19	14,08	
5.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Kapasitasnya	positif	%	7,61	9,61	11,61	13,61	15,61	17,61	19,61	
6.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	positif	Ribu Orang	1.667,1	2.497,8	2.722,6	2.947,4	3.172,2	3.397	3.621,8	
7.	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	positif	Perjalanan	3.491.947	3.500.450	3.512.500	3.525.750	3.539.850	3.565.550	3.606.151	
8.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	positif	Hari	1,64	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	
9.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	83,46	83,58	83,58	83,68	83,68	83,8	
10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	positif	Indeks	88,86	88,9	88,95	89	89,15	89,3	89,5	
11.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	positif	%	8,9	49,83	9	8,26	7,63	7,09	6,62	
12.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	positif	%	52,12	0,24	0,34	0,38	0,4	0,73	1,14	
13.	Tingkat hunian akomodasi	positif	%	56,54	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	
14.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	positif	%	1,9	2	2,11	2,21	2,31	2,41	2,52	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Oleh karena itu tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan yang terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kepulauan Riau dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Riau.

Perencanaan Strategis berkaitan erat dengan fungsi utama organisasi yang bersifat praktis, yang membuahkan perumusan tujuan yang merupakan bagian internal dari proses manajemen strategis berupa target-target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian sasaran yang fokusnya pada *action*, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Program dan kegiatan/sub kegiatan indikatif yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam rencana kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang disusun setiap tahun. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung dari komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dukungan legislatif dan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2029, dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2026-2030. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2025-2029 berakhir, maka

Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahun pertama (tahun 2030) dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan mengacu RPJMN. Rencana strategis 2025-2029 ini dalam perjalanannya juga memungkinkan untuk dilakukan revisi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025-2029 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Hal ini dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau yang semakin meningkat/ maju dalam rangka mewujudkan tujuan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau pada tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif”**.

Berdasarkan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2025-2029 dalam hal pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika perkembangan kepariwisataan regional dan global, maka untuk memacu percepatan pencapaian visi dan misi tersebut perlu diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya. Faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah. Hal-hal yang penting diperhatikan sebagai syarat dalam menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan komitmen seluruh *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk meningkatkan citra pariwisata daerah dalam upaya menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah tujuan utama pariwisata nasional dan internasional.
2. Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung serta penataan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3. Komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan budaya daerah menjadi pesona seni budaya sebagai penunjang pariwisata.
5. Meningkatkan dukungan pemerintah dan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan pengembangan perencanaan teknis pariwisata dalam upaya pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif													
							2023	2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
VISI: KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MESTA																						
Misi 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah																						
Meningkatnya kinerja pariwisata berbasis dunia dan ekonomi kreatif					Rasio PDR Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,9	1,9	2,00			2,11		2,21		2,31		2,41		2,52		
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau				Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	9.740,75	15.932,37	17.620,25			19.366,61		21.279,33		23.373,96		25.667,50		28.178,52		
					Proporsi PDR Ekonomi Kreatif Terhadap PDR Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	NA	2,65			2,68		2,71		2,74		2,77		2,80		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,09	1,89	1,90	180.266.734	1,95	660.000.000	2,00	1.150.000.000	2,05	700.000.000	2,10	600.000.000	2,15	2.200.000.000	2,15	5.490.266.734
					Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1,77	1,64	1,65			1,70		1,75		1,80		1,85		1,90		1,90
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Daya Tarik	0	0	0	0	2	310.000.000	3	350.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	1.150.000.000	34	2.410.000.000
		3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditertapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	0	3	3	50.000.000	0	0	0	0	0	0	3	50.000.000
		3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	1	140.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	2	500.000.000	6	1.090.000.000
		3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	0	1	0	0	7	70.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	150.000.000	35	370.000.000
		3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	100	500.000.000	200	900.000.000
		3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Kawasan Strategis	0	0	0	0	2	200.000.000	5	200.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	500.000.000	22	1.200.000.000
		3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditertapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	5	5	50.000.000	0	0	0	0	0	5	5	50.000.000
		3.26.02.1.02.0007	Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditertapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	2	200.000.000	4	400.000.000
		3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	0	0	0	0	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	100.000.000	28	250.000.000
		3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	0	0	0	0	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	50	200.000.000	125	500.000.000
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Destinasi	0	0	2	180.266.734	1	300.000.000	2	500.000.000	2	200.000.000	2	100.000.000	2	300.000.000	11	1.430.266.734
		3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditertapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	0	0	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000
		3.26.02.1.03.0007	Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditertapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	6	600.000.000
		3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Tersedianya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Dokumen	0	1	1	180.266.734	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	480.266.734
		3.26.02.1.03.0013	Facilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Terlaksananya Facilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Dukung Dalam Rangka Mendukung Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	1	100.000.000	3	300.000.000	
		3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Untuk Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk Industri dan Usaha	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Industri	10	10	0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	250.000.000	50	450.000.000
		3.26.02.1.04.0009	Facilitasi Pendampingan Penetration Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terlaksananya Pendampingan Penetration Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	50	30	0	0	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	250.000.000	200	450.000.000
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jumlah pemasaran pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	1.530,9	1.667,1	2.497,8	8.708.633.839	2.722,6	6.464.000.000	2.947,4	4.935.000.000	3.172,2	6.535.000.000	3.397,0	9.975.000.000	3.621,8	13.075.000.000	3.621,8	49.692.633.839
					Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	2.295.496	3.491.947	3.500.450		3.512.500		3.525.759		3.539.850		3.565.590		3.606.151		3.606.151	
		3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	Promosi	6	6	7	8.708.633.839	7	6.464.000.000	7	4.935.000.000	7	6.535.000.000	7	9.975.000.000	7	13.075.000.000	42	49.692.633.839
		3.26.03.1.01.0001	Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	38	33	3	2.091.599.129	5	1.164.000.000	5	1.150.000.000	5	1.150.000.000	5	1.150.000.000	5	3.800.000.000	28	10.505.599.129
		3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	0	0	1	223.317.005	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	5	623.317.005
		3.26.03.1.01.0006	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Facilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	14	10	20	6.993.717.705	15	5.300.000.000	10	3.735.000.000	15	5.335.000.000	15	8.775.000.000	15	9.025.000.000	90	38.563.717.705
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0,00	2,22	4,65	810.333.811	6,54	800.000.000	6,42	2.100.000.000	10,31	2.900.000.000	12,19	1.300.000.000	14,08	2.950.000.000	14,08	10.460.333.811
		3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif	Jumlah Dokumen Pelaku Usaha Kreatif yang Dikembangkan dan Disiapkan Sarana dan Prasarannya	Dokumen	0	0	0	0	1	200.000.000	1	600.000.000	1	1.000.000.000	1	300.000.000	1	850.000.000	5	2.950.000.000
		3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	1	200.000.000	2	500.000.000
		3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000
		3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	1.000.000.000	0	1	350.000.000	3	1.550.000.000	
		3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1	1	1	810.333.811	1	600.000.000	1	1.500.000.000	1	1.900.000.000	1	1.000.000.000	1	1.700.000.000	6	7.510.333.811
		3.26.04.1.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran Kreatif	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	1	100.000.000	1	200.000.000	3	500.000.000
		3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	Terlaksananya Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	0	1	72.922.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	72.922.000
		3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	1	0	0	1	50.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.250.000.000		
		3.26.04.1.02.0012	Penyusunan dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000
		3.26.04.1.02.0013	Kelembagaan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang	60	0	0	0	50	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	250	950.000.000
		3.26.04.1.02.0014	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Promosi	0	2	6	677.778.351	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000</				

3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	82	64	130	399.750.700	265	616.000.000	500	1.440.000.000	500	1.490.000.000	630	1.750.000.000	620	1.750.000.000	2.635	7.495.750.700
3.26.05.1.01.0004	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	82	64	50	91.362.000	240	466.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	250	500.000.000	1290	2.737.362.000
3.26.05.1.01.0008	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0	1	72.257.400	0	0	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	672.257.400
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	0	0	40	82.674.000	25	300.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	70	150.000.000	70	150.000.000	305	722.674.000
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berkeadilan dan Sektornya	Berkembangnya Kapasitas SDM Pariwisata Berkeadilan pada Sektornya	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berkeadilan pada Sektornya	Orang	0	0	0	0	0	0	100	220.000.000	100	220.000.000	200	450.000.000	200	450.000.000	600	1.340.000.000
3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	40	89.944.000	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	440	889.944.000
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	1	0	1	23.513.300	1	50.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	6	1.023.513.300
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	150	375.000.000	150	375.000.000	150	375.000.000	150	375.000.000	600	1.500.000.000
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0	0	0	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	400	900.000.000
3.26.05.1.02.0007	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitas sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	0	0	0	0	0	0	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	200	600.000.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	13.825.294.503	BB	15.626.938.329,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	BB	15.555.446.601,94	BB	91.674.019.241
			Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	0,00	0,00	83,46		83,58		83,58		83,68		83,68		83,80		83,80	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,91	88,86	88,90		88,95		89,00		89,15		89,30		89,50		89,50	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	134.613.315	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	16	1.534.613.315
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6	6	815.614.185	5	500.000.000	5	300.000.000.00	5	200.000.000	5	300.000.000	5	200.000.000	31	1.065.614.185
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5	5	18.999.130	5	50.000.000	5	48.181.500	5	48.181.500	5	48.181.500	5	48.181.500	261	725.130
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	1	51.818.400	1	51.818.400	1	51.818.400	1	51.818.400	4	207.275.000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Pegawai Negeri Sipil	%	100	100	100	100	11.126.500.000	100	13.065.446.601,94	100	13.065.446.601,94	100	13.065.446.601,94	100	13.065.446.601,94	100	13.065.446.601,94	76.403.739.875	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	47	45	71	10.602.708.000	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	72	12.541.654.601,93	73	73.310.981.075
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1	1	513.792.000	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	1	513.792.000,01	6	3.062.752.000
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	60.000.000
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	0	0	0	0	100	375.400.000	100	375.400.000	100	375.400.000	100	375.400.000	100	375.400.000	1.877.000.000	
3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Keleengkapan	Tersedianya Pakan Dinas Beserta Atribut Keleengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Keleengkapan	Paket	0	0	0	0	3	275.400.000	3	275.400.000	3	275.400.000	3	275.400.000	3	275.400.000	15	1.377.000.000
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	500.000.000
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	762.601.503	100	1.052.031.680	100	838.539.950	100	838.539.950	100	838.539.950	100	838.539.950	100	5.168.792.883
3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Esensial	Tersedianya Bahan Logistik Esensial	Jumlah Paket Bahan Logistik Esensial yang Disediakan	Paket	3	3	3	200.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	38	350.000.000
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Pengesadahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan Pengesadahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	529.800.000	2	112.000.000	2	112.000.000	2	112.000.000	2	112.000.000	2	112.000.000	12	889.800.000
3.26.01.1.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	782.801.500	12	780.031.680	12	576.539.950	12	576.539.950	12	576.539.950	12	576.539.950	72	3.328.912.383
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Peralatan Mesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	Unit	16	8	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	50	1.000.000.000
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	8	0	0	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	50	1.000.000.000
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	1.625.705.628	100	436.251.700	100	478.251.700	100	478.251.700	100	478.251.700	100	478.251.700	306	3.964.964.148
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	13.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	88.000.000
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	46.000.000	12	63.760.000	12	105.760.000	12	105.760.000	12	105.760.000	12	105.760.000	72	533.400.000
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1.556.105.628	12	357.491.700	12	357.491.700	12	357.491.700	12	357.491.700	12	357.491.700	72	3.343.564.148
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara Sesuai Rencana Tahunan	%	100	100	100	185.874.000	100	297.808.350	100	297.808.350	100	297.808.350	100	297.808.350	100	297.808.350	100	1.674.915.720
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	2	76.074.000	2	111.224.000	2	111.224.000	2	111.224.000	2	111.224.000	2	111.224.000	12	632.194.000
3.26.01.1.09.0002	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	6	85.780.000	6	145.074.000	6	145.074.000	6	145.074.000	6	145.074.000	6	145.074.000	36	811.150.000
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	23	30	24.020.000	50	41.510.350	50	41.510.350	50	41.510.350	50	41.510.350	50	41.510.350	280	231.571.720
					TOTAL:			23.884.279.587	24.166.938.329,94			25.555.446.601,94			27.055.446.601,94			29.555.446.601,94		

Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau
Hasan, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP 19771110206041010